

## PERAN PARA PIHAK TERHADAP KEBERLANJUTAN KESEPAKATAN KONSERVASI MASYARAKAT DI TAMAN NASIONAL LORE LINDU

**Sudirman Daeng Massiri<sup>1)</sup>, Bramasto Nugroho<sup>2)</sup>, Hariadi Kartodihadjo<sup>2)</sup>, Rinekso Soekmadi<sup>2)</sup>**

1) Staf Pengajar Fakultas Kehutanan, Universitas Tadulako, Palu, 94117. Email: sudi\_untad@yahoo.co.id

2) Staf Pengajar Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Dramaga, Bogor

### ABSTRACT

Management of National Parks cause interdependence of many parties so that required appropriate institutional arrangements. However, the rules which have been designed in an institution often not implemented by stakeholders sustainably. This phenomenon occurs in Lore Lindu National Park (LLNP), in which property rights and the rules of Community Conservation Agreement (CCA) designed since the early 2000s is not implemented by stakeholders in LLNP. This problem situation suspected closely related to the interests, capacity, rights, responsibilities, revenues and relationship between stakeholders in the management of national parks. This research aimed to understand how the interests, capacity, rights, responsibilities, revenues and relationship of the stakeholders affected the performance of CCA. To achieve these objectives, this study was using a stakeholder analysis with 4RS framework (rights, responsibility, revenues and relationship) and analysis of access. This study used qualitative research methods with conduct interviews with key informants to obtain deeply explanation about the role the stakeholders in the agreement. The study found that the high interests of stakeholders to resources of LLNP were land, timber for local need, biodiversity, water and tourism. Local community have high capacity to access gain of resources in LLNP, while the high control access capacity in LLNP were LLNP officer, Village Chiefs, Customary Institutions in homogenous villages and Village Conservation Council/LKD in Rimba zone. However, they did not have high capacity of access maintenance for the use of forest resources. Imbalance of rights, responsibilities and revenues of stakeholders became one the constraints for the sustainability CCA. The relationship between local communities, local institutions to BBTNLL was categorized as poor, even though it has constructed efforts of conservation agreements.

**Key Words:** *Lore Lindu National Park, Community Conservation Agreement*

*Diterima tanggal 25 Juli 2016, Disetujui tanggal 30 Agustus 2016*

### PENDAHULUAN

Karakteristik khas sumberdaya hutan, termasuk sumberdaya hutan di kawasan konservasi TNLL, adalah memberikan manfaat bagi banyak pihak baik manfaat langsung maupun manfaat tidak langsung. Menurut Kartodihardjo (2006) manfaat langsung hutan dapat dimiliki secara eksklusif oleh pihak pengguna, sedangkan manfaat tidak langsung bersifat tanpa batas dan dibutuhkan oleh banyak pihak. Manfaat tidak langsung tersebut merupakan barang publik

(*public property*) dan menurut Nugroho *et al.* (2012), pemerintah wajib menjamin keberadaan barang publik karena dibutuhkan oleh masyarakat banyak sedangkan pihak swasta atau individu tidak ada yang bersedia menyediakan.

Peran masing-masing pihak dalam penggunaan sumberdaya hutan menimbulkan interdependensi satu sama lain. Penggunaan manfaat langsung sumberdaya hutan di kawasan konservasi akan mempengaruhi keberadaan manfaat tidak langsung hutan tersebut yang dinikmati oleh masyarakat banyak. Begitupun

sebaliknya, kebijakan pengelolaan kawasan konservasi yang membatasi akses masyarakat lokal yang bergantung terhadap sumberdaya hutan menyebabkan masyarakat itu menjadi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang bersumber dari hutan. Kondisi ini mengisyaratkan pentingnya pengelolaan kolaboratif dalam kawasan konservasi agar kepentingan para pihak itu terakomodasi. Hal ini telah ditegaskan oleh Soekmadi (2003) pentingnya perubahan paradigma pengelolaan kawasan konservasi yang melibatkan multi pihak yang berkepentingan dan mengakomodasi kepentingan masyarakat setempat.

Upaya untuk mengatur agar pemanfaatan sumberdaya hutan dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi banyak pihak adalah melalui pengaturan institusi. Banyak ilmuwan yang memberikan definisi tentang institusi (Schmid 1987; North 1990; Kasper dan Streit 1999; Ostrom 2005), dan pada intinya menekankan institusi itu sebagai aturan dalam berinteraksi. Aliran institusi meyakini bahwa penyusunan aturan dan penegakan ha katas sumberdaya dalam institusi pengelolaan sumberdaya alam dipandang mampu menyelesaikan masalah degradasi sumberdaya tersebut. Namun faktanya, banyak juga institusi yang dibangun tidak berjalan seperti yang direncanakan dan para pihak berperilaku tidak berdasarkan struktur yang telah disepakati. Hal ini tidak terlepas dari power yang dimiliki oleh para pihak. Selain struktur, Ribot dan Peluso (2003) mengungkapkan perilaku individu banyak ditentukan oleh kapasitas yang mereka miliki.

Hak masyarakat lokal terhadap sumberdaya TNLL dan aturan-aturan yang telah yang telah dirancang dalam institusi Kesepakatan Konservasi Masyarakat (KKM), umumnya, tidak menjadi sebuah struktur yang dijalankan oleh para pihak yang berkepentingan terhadap TNLL. Hampir di semua desa KKM, aturan kolektif tidak berjalan lagi. Menurut Ostrom (1990) aturan kolektif ini mengatur keterlibatan para pihak dalam pengambilan keputusan terkait dengan penetapan aturan operasional. Pasca dibangun KKM, dapat dikatakan, tidak pernah lagi dilakukan pertemuan

dan komunikasi yang intensif antara pengelola TNLL dengan institusi lokal untuk membahas kesepakatan yang telah dibuat. Rencana pengelolaan partisipatif yang telah disusun oleh Lembaga Konservasi Desa dan BBTNLL umumnya tidak berjalan. Ini menjadi hal yang menarik untuk dikaji dan diduga kondisi ini bertalian erat dengan kepentingan, kapasitas, manfaat yang diterima dan hubungan antara para pihak yang terlibat dalam kesepakatan itu.

Kapasitas para pihak merupakan kunci utama bagi pengembangan dan perubahan institusi. Kapasitas memiliki arti yang luas, namun terdapat kedekatan makna antara *power* dan *capacity*. Kapasitas menggambarkan kemampuan (*ability*) individu, kelompok atau organisasi untuk menjawab perubahan lingkungan sebagai bagian dari usaha untuk mencapai tujuan (Dubois 1989). Enserink *et al.* (2010) mengungkapkan bahwa tiap aktor memiliki spektrum kapasitas yang berbeda. Kapasitas para pihak itu, menurut Ribot dan Peluso (2003), bergantung pada akses baik itu akses terhadap teknologi, modal, pasar, pengetahuan atau keahlian, informasi, posisi yang dimiliki dan jaringan. *Web* atau *bundle of power* adalah proses dan hubungan yang memungkinkan aktor mampu memperoleh, mengontrol dan menjaga akses terhadap sumberdaya.

Pengelolaan taman nasional adalah upaya untuk menyediakan barang publik. Untuk dapat menciptakan barang publik, kepuasan *stakeholder* merupakan hal yang sangat penting. Menurut Bryson (2004) analisis *stakeholder* sangat dibutuhkan untuk memuaskan para pihak agar dapat menciptakan nilai publik atau memproduksi barang publik. Menurut Dubois (1989), ketidak seimbangan antara hak, tanggung jawab dan manfaat yang diterima oleh *stakeholders*, menjadi hambatan keberlanjutan atas program-program yang telah dibangun.

Penerapan analisis *stakeholder* yang dilengkapi dengan kerangka kerja 4Rs (*rights, responsibility, revenue* dan *relationship*) dan ditunjang dengan teori akses dapat berguna dalam mengevaluasi KKM sebagai pengelolaan kolaboratif yang dibangun di TNLL. Pertanyaan

penelitian yang akan dijawab dalam kajian ini adalah bagaimana peran para pihak berdasarkan kepentingan, kapasitas yang dimiliki, hak, tanggungjawab dan manfaat yang diperoleh serta hubungan para pihak mempengaruhi kinerja KKM di TNLL?.

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran para pihak terhadap keberlanjutan kesepakatan konservasi masyarakat di Taman Nasional Lore Lindu

### METODE PENELITIAN

#### Waktu dan Tempat

Penelitian ini berlangsung selama tiga bulan yakni bulan Oktober 2014 Desember 2014. Penelitian ini dilaksanakan di TNLL yang meliputi dua wilayah administrasi pemerintahan yakni Kabupaten Sigi dan Kabupaten Poso serta kantor pusat BBTNLL di Kota Palu.

#### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, menurut Irawan (2006) yakni bermaksud menjelaskan secara mendalam tentang peran para pihak dalam pengelolaan TNLL terkait dengan kepentingan, kekuatan, hak, tanggung jawab, manfaat yang diterima dan hubungan antara *stakeholder*.

#### Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh melalui laporan dan dokumen yang terkait dengan pengelolaan TNLL. Data primer dikumpulkan melalui wawancara baik secara terstruktur menggunakan kuesioner maupun wawancara mendalam kepada informan kunci. Kriteria penetapan informan kunci adalah pihak yang berkepentingan terhadap ekosistem TNLL atau mengetahui persoalan pengelolaan TNLL. Metode penentuan informan ini menerapkan metode *snowball sampling* (Black dan Champion 2009).

#### Analisis Data

Identifikasi kepentingan para pihak terhadap TNLL dianalisis secara deskriptif dan disajikan dalam bentuk tabel. Nilai kepentingan para pihak terhadap ekosistem TNLL diukur secara berjenjang dengan kriteria tinggi, sedang, rendah dan tidak memiliki kepentingan. Indikator yang digunakan untuk menilai tingkat kepentingan para pihak adalah tingkat kepedulian terhadap keberadaan TNLL, tingkat manfaat yang diperoleh atas kepentingannya yang terpenuhi, tingkat ketergantungan, kewenangan, dan program di dalam taman nasional. Untuk menjawab peran para pihak dalam pengelolaan TNLL digunakan analisis *stakeholder* yang dilengkapi dengan kerangka penilaian 4Rs Dubois (1998) dan analisis akses Ribot dan Peluso (2003). Analisis akses digunakan untuk memahami kapasitas para pihak di dalam KKM dalam menjalankan perannya baik itu ia sebagai pengguna, pengontrol maupun pemelihara akses terhadap sumberdaya hutan di TNLL. Indikator yang digunakan untuk menilai kapasitas tersebut meliputi kekuatan personal, *property*, organisasi, pengetahuan dan keterampilan, otoritas kewenangan, dan informasi. Analisis *stakeholder* 4Rs digunakan untuk memahami mengapa kesepakatan dan rencana pengelolaan partisipatif yang dibuat tidak berjalan, dengan menganalisis keseimbangan antara *rights*, *responsibility* dan *revenues*, dan menjajaki hubungan antar *stakeholder*. Nilai atas hak, tanggung jawab dan manfaat yang diterima para pihak ditentukan secara berjenjang dengan kriteria sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan tidak memiliki hak, tanggung jawab dan manfaat terhadap TNLL.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Kepentingan Para Pihak terhadap Ekosistem TNLL

Pihak yang berkepentingan terhadap ekosistem TNLL meliputi masyarakat lokal, LKD, Kepala Desa, Lembaga Adat, FWP, BBTNLL, BPDAS, LSM, perguruan tinggi, Pemda Kab. Poso dan Pemda Kabupaten Sigi. Kepentingan para

pihak ini terhadap ekosistem TNLL ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Kepentingan *stakeholders* terhadap sumberdaya alam di TNLL

Para pihak yang berkepentingan	Kepentingan terhadap ekosistem TNLL								
	lahan	Kayu*	rotan	Obat*	madu	damar	Bio*	wisata	Air
Masyarakat Lokal	+++	+++	++	++	+	++		+	+++
LKD	+++	+++	++	++	++	++	+	++	+++
Kepada Desa	+++	+++	++	++	++	++		++	+++
Lembaga Adat	+++	+++	++	++	++	++		++	+++
FWP	+++	++	++	++	++	++		+	+++
BBTNLL	+++	+	+	+	+	+	+++	+++	++
BPDAS Palu-Poso	+++								+++
LSM	++						++		
Perguruan Tinggi dan peneliti			+	++	++		++	++	++
Bappeda Kab. Sigi	+							+++	+++
Dinas Pariwisata Kab. Sigi								+++	
Bappeda Kab. Poso	+							++	++
Dinas Pariwisata Kab. Poso								++	

Keterangan: +++ = tinggi, ++ = sedang, + = rendah, tanpa notasi = tidak memiliki kepentingan, Kayu\* = kayu untuk kebutuhan lokal, obat\* = bahan obat tradisional, bio\* = biodiversitas

Tabel 1 memperlihatkan bahwa kepentingan yang tinggi bagi para pihak terhadap ekosistem TNLL adalah lahan, kayu untuk kebutuhan lokal, air, biodiversitas dan wisata. Kepentingan para pihak tersebut ada yang bersifat saling mendukung dan ada juga yang saling bertentangan, sehingga menimbulkan situasi kerjasama atau konflik di antara para pihak itu.

Biodiversitas merupakan sumberdaya alam yang perlu dilestarikan karena kehilangan biodiversitas akan mengurangi kapasitas ekosistem untuk menyediakan barang dan jasa yang cukup dan berkelanjutan bagi masyarakat (Tilman 2000). Ninan *et al.* (2007) juga menegaskan bahwa kehilangan biodiversitas bukan hanya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi tetapi juga berpengaruh terhadap kapasitas untuk melestarikan pertumbuhan

ekonomi. Di TNLL, hanya pihak BBTNLL yang memiliki kepentingan yang tinggi terhadap kelestarian biodiversitas, sebab hal itu telah menjadi tugas pokoknya untuk mengamankan kawasan dan melestarikan biodiversitas yang ada dalam kawasan. Masyarakat lokal dan institusi lokal yang ada belum menganggap biodiversitas sebagai kepentingan yang tinggi karena belum memahami manfaat nyata dari pelestarian biodiversitas.

Pihak yang memiliki kepentingan yang tinggi terhadap lahan adalah masyarakat lokal, Kepala Desa, Lembaga Adat, FWP, BBTNLL dan BPDAS Palu-Poso. Kepentingan BPDAS Palu-Poso adalah melakukan rehabilitasi lahan hutan yang rusak di TNLL. Kepentingan masyarakat lokal yang tinggi terhadap lahan adalah ingin tetap mengelola lahan kebun yang masuk di kawasan TNLL khususnya yang terdapat di zona

rehabilitasi. Lembaga Adat berkepentingan untuk mendapatkan pengakuan atas lahan di TNLL sebagai hak ulayat adat. Begitu juga dengan LKD, FWP dan Kepala Desa memiliki kepentingan mengatur pemanfaatan sumberdaya lahan. Di sisi lain, pihak BBTNLL memiliki kepentingan terhadap lahan tersebut untuk dipertahankan sebagai kawasan TNLL. Perbedaan kepentingan antara masyarakat lokal, lembaga lokal dan BBTNLL melahirkan situasi konflik, dan KKM itu seyogyanya menjadi institusi yang dapat mengatasi konflik lahan melalui pengaturan pemanfaatan sumberdaya hutan.

Pihak yang memiliki kepentingan yang tinggi terhadap kayu untuk kebutuhan lokal adalah masyarakat lokal, LKD, Lembaga Adat dan Kepala Desa. Kepentingan kayu untuk kebutuhan lokal bagi masyarakat adalah untuk kebutuhan kayu bakar, bahan bangunan dan perkakas, bukan untuk tujuan komersil. LKD, Kepala Desa dan Lembaga Adat memiliki kepentingan yang tinggi untuk mengontrol agar tidak terjadi kerusakan ekosistem yang dapat mengancam terjadinya bencana.

Para pihak yang memiliki kepentingan yang tinggi terhadap sumberdaya air di TNLL adalah masyarakat lokal, LKD, Kepala Desa, Lembaga Adat, BPDAS dan Bappeda Kabupaten Sigi. Masyarakat lokal sekitar TNLL sangat bergantung terhadap sumberdaya air dari TNLL untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik untuk kebutuhan konsumsi air minum, mandi, mencuci maupun untuk kebutuhan pengairan sawah. Desa-desanya sekitar TNLL umumnya berada pada ketinggian lebih 700 m dpl, sehingga ketersediaan air tanah sangat terbatas. Hal ini juga menjadi kepentingan yang tinggi bagi institusi lokal seperti Lembaga Adat dan Kepala Desa untuk mengatur agar ketersediaan air tetap terjaga melalui upaya menjaga hutan. Pada satu sisi, masyarakat lokal memiliki kepentingan yang tinggi terhadap lahan untuk berkebun khususnya di zona rehabilitasi, namun pada sisi lain mereka juga memiliki kepentingan yang tinggi terhadap keberlangsungan sumberdaya air, sehingga perlu

mengatur pemanfaatan sumberdaya lahan agar ketersediaan sumberdaya air tetap terjamin.

Upaya untuk melestarikan sumberdaya air ini dilaksanakan melalui program rehabilitasi oleh BPDASPAS yang melibatkan masyarakat lokal. Keberadaan hutan di TNLL penting untuk dilestarikan sebab kawasan hutan ini merupakan hulu dari tiga sub DAS yakni sub DAS Gumbasa, Sub Das Miu dan sub DAS Lariang dan terdapat danau Lindu seluas 3.488 ha. Air yang berasal dari sub DAS Miu dan sub DAS Gumbasa bermuara di sungai Palu, sedangkan air yang mengalir di sub DAS Lariang mengarah ke Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan begitu, selain masyarakat lokal sekitar TNLL, juga banyak masyarakat yang bergantung terhadap sumberdaya air yang berasal dari TNLL, utamanya masyarakat kota Palu. Potensi air di TNLL ini juga dipandang penting bagi Pemda Kabupaten Sigi karena sekitar 75% wilayah Kabupaten Sigi adalah kawasan hutan. Luas kawasan TNLL yang berada dalam wilayah Kabupaten Sigi adalah 119.360,79 ha (BBTNLL, 2013). Kondisi ini, menurut Sekretaris Bappeda Kabupaten Sigi, merupakan potensi bagi Pemda Kabupaten Sigi untuk mengembangkan kabupaten Konservasi.

Pihak yang memiliki kepentingan yang tinggi terhadap wisata di TNLL adalah BBTNLL, Bappeda Kabupaten Sigi dan Dinas Pariwisata Kabupaten Sigi. Pemda Kabupaten Poso memiliki kepentingan terhadap wisata berkategori sedang. Saat ini dilakukan upaya pemekaran kabupaten Poso yang akan menjadi kabupaten Tampo Lore sebagai kabupaten konservasi dengan mengandalkan potensi wisata utamanya yang ada di TNLL. Luas kawasan TNLL yang berada di kabupaten Poso yakni 96.630,39 ha, meliputi empat kecamatan yakni kecamatan Lore Utara, kecamatan Lore Peore, kecamatan Lore Tengah dan kecamatan Lore Barat.

Potensi Wisata yang ada di TNLL pada empat kecamatan itu antara lain air terjun Watumaeta, padang savana di Bariri, air terjun Kolori di Bada, jalur trekking Lelio-Doda, air terjun Kageroa di Bada, spot pengamatan burung di Tuare, keindahan landscape lembah Napu, tarian

Morego dan musik bambu di Doda. Selain itu, di empat kecamatan itu terdapat situs megalith berupa arca menhir, kalamba, dulang batu dan altar. Di Kabupaten Sigi terdapat juga Potensi wisata antara lain *Camping ground*, penangkaran semi alami burung maleo, keindahan danau lindu, air terjun lindu, kearifan tradisional masyarakat toro, pengamatan satwa, penangkaran anggrek dan juga beberapa situs megalith (BBTNLL 2014).

### Kapasitas Para Pihak dalam Mengakses Sumberdaya Hutan di TNLL

Gambaran kapasitas para pihak baik menggunakan, mengontrol maupun memelihara akses terhadap sumberdaya TNLL, berdasarkan hasil wawancara, tercantum pada Tabel 2.

Tabel 2. Kapasitas para pihak dalam mengakses sumberdaya alam di TNLL

Stakeholders	Kapasitas akses		
	Menggunakan sumberdaya	mengontrol akses	Memelihara/ mengatur akses
Masyarakat Lokal	+++		
LKD		+++/+	+
Kepada Desa		+++	++
Lembaga Adat		+++/+	++
FWP		+	+
BBTNLL		+++	++
BPDAS Palu-Poso			+++
LSM			++
Perguruan Tinggi dan peneliti	++		
Bappeda Kabupaten Sigi			++
Dinas Pariwisata Kabupaten Sigi			++
Bappeda Kab. Poso			++
Dinas Pariwisata Kab. Poso			++

Keterangan: +++ = tinggi, ++ = berarti sedang, + = berarti rendah dan tanpa notasi = tidak memiliki kapasitas

Pengguna akses langsung sumberdaya alam di TNLL adalah masyarakat lokal dan perguruan tinggi/peneliti. Pihak yang memiliki kapasitas tinggi/peneliti. Pihak yang memiliki kapasitas tinggi dalam memanfaatkan sumberdaya TNLL adalah masyarakat lokal. Masyarakat lokal di sekitar TNLL terdiri atas penduduk asli dan penduduk pendatang. Mekanisme akses penduduk asli terhadap sumberdaya alam di TNLL adalah melalui klaim bahwa sebagian wilayah TNLL yang ditetapkan sebagai wilayah KKM itu merupakan tanah ulayat masyarakat adat. Mereka mengakui bahwa orang tua dan nenek moyang mereka sudah memanfaatkan sumberdaya alam di kawasan TNLL jauh sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai kawasan taman nasional.

Klaim tersebut ditunjukkan oleh adanya kuburan tua dan pohon bambu serta tanaman kopi yang tumbuh di wilayah tersebut. Lahan yang diklaim sebagai wilayah adat tersebut kini banyak juga dikembangkan menjadi lahan perkebunan dengan sistem kepemilikan pribadi. Sebagian masyarakat lokal sebagai pengguna akses masih memanfaatkan lahan untuk berkebun dan juga memanfaatkan sumberdaya hutan seperti kayu untuk bahan bangunan, kayu bakar, meskipun mereka tidak memiliki hak legal yang diatur dalam perundang-undangan.

Mekanisme akses penduduk pendatang di sekitar TNLL seperti suku bugis dan suku jawa terhadap sumberdaya lahan di TNLL dilakukan

melalui dua cara yakni membeli lahan dari penduduk asli atau menggarap lahan yang diklaim oleh penduduk asli dengan pola bagi hasil. Jika penduduk asli memiliki lahan berhutan 2 ha, contohnya, masyarakat pendatang menggarap lahan tersebut untuk dijadikan sebagai kebun kakao. Setelah tanaman kakao tersebut mencapai umur tertentu maka 1 ha dari lahan itu menjadi milik penggarap dan pada akhirnya, sisa 1 ha lahan kebun milik penduduk asli itu pada umumnya dijual juga ke masyarakat pendatang. Kapasitas akses terhadap teknologi, modal dan tenaga kerja yang tinggi yang dimiliki oleh penduduk pendatang itu mampu mengakses sumberdaya lahan di TNLL. Hal ini diungkapkan Ribot dan Peluso (2003) bahwa kekuatan modal, tenaga kerja dan teknologi menentukan pihak untuk memperoleh manfaat atas sumberdaya.

Para pihak yang memiliki kapasitas untuk mengontrol akses atas pemanfaatan sumberdaya alam TNLL adalah LKD, Kepala Desa, Lembaga Adat, dan BBTNLL. BBTNLL memiliki kapasitas kewenangan yang tinggi untuk mengontrol akses pemanfaatan TNLL. Namun, berdasarkan pertimbangan luas wilayah pengelolaan, aksesibilitas dan jumlah pegawai yang ada, kapasitas BBTNLL belum optimal untuk mengontrol kawasan TNLL yang luas itu. Jumlah pegawai BBTNLL berdasarkan Statistik Taman Nasional Lore Lindu (2013), adalah 13 orang pegawai pengendali ekosistem hutan dan 41 orang polisi kehutanan yang mengontrol kawasan taman nasional seluas 217.991,18 ha. Rasio luas kawasan TNLL dengan polisi hutan adalah 5.316 ha/polisi. Wilayah pengelolaan yang luas tersebut akan menyebabkan informasi tidak sempurna. Menurut Schmid (1987) informasi yang tidak sempurna bisa menimbulkan pengguna gratis yang tidak diharapkan.

Keberadaan Lembaga Adat, Kepala Desa dan LKD, sebagai institusi lokal di tingkat desa sebenarnya merupakan potensi yang sangat besar untuk membantu BBTNLL dalam mengontrol akses pemanfaatan sumberdaya alam TNLL, karena mereka memiliki potensi kekuatan informasi dan personal. Kekuatan informasi karena

institusi lokal tersebut sangat dekat dengan wilayah taman nasional, sedangkan kekuatan personal karena masih terdapat masyarakat lokal yang menjunjung tinggi dan patuh kepada pemimpin mereka termasuk aturan adat. Penetapan institusi KKM telah memberikan hak dan tanggung jawab kepada lembaga lokal tersebut untuk mengontrol dan memelihara akses masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya alam di TNLL. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri kapasitas Lembaga Adat di desa yang heterogen yang memiliki banyak suku pendatang cenderung lemah dibandingkan yang masih homogen dalam mengontrol akses pemanfaatan sumberdaya hutan.

LKD sebagai lembaga ditingkat desa yang dibentuk dalam kesepakatan konservasi memiliki kapasitas yang bervariasi dalam mengontrol akses terhadap pemanfaatan sumberdaya TNLL. Di desa yang berdekatan dengan zona rimba, LKD memiliki kapasitas kontrol yang tinggi tetapi di zona rehabilitasi, LKD memiliki kapasitas yang rendah. Motivasi LKD untuk melakukan kontrol yang aktif di Zona Rimba adalah ketergantungan yang tinggi terhadap sumberdaya air dan ketakutan atas bencana, sementara di zona rehabilitasi LKD tidak dapat menerapkan sanksi kepada pihak yang melanggar aturan karena lahan hutan yang telah menjadi kebun dan dimiliki secara pribadi.

Para pihak yang memiliki kapasitas memelihara/mengatur akses atas pemanfaatan sumberdaya alam di TNLL adalah LKD, Kepala Desa, Lembaga Adat, FWP, BBTNLL, BPDAS Palu-Poso, LSM, dan Bappeda. Pada saat proyek CSIDCP masih berjalan, FWP memiliki kapasitas yang tinggi dalam memperjuangkan hak masyarakat terhadap pemanfaatan sumberdaya TNLL karena masih ditunjang dengan dana, sarana dan prasarana, namun kini kapasitas lembaga tersebut telah lemah karena tidak ada perhatian dari pemerintah. Menurut Ketua Bappeda Kabupaten Poso bahwa FWP itu didanai dari dana proyek CSIDCP dan setelah proyek berakhir tidak dianggarkan lagi karena keterbatasan dana bagi Pemda. Begitu juga

dengan FWP yang ada di Kabupaten Sigi, saat ini juga tidak lagi mendapatkan dukungan dana dari Pemda. Sekretaris Bappeda Kabupaten Sigi mengungkapkan, dulu FWP itu mendapatkan dukungan dana dari Pemda Kabupaten Donggala melalui proyek CSIDCP dan setelah pemekaran kabupaten Donggala menjadi Kabupaten Sigi, ia tidak dianggarkan lagi karena alasan keterbatasan dana bagi Pemda Kabupaten Sigi. LKD, Kepala Desa dan Lembaga Adat juga memiliki kapasitas sedang dan lemah dalam memelihara akses pemanfaatan sumberdaya alam di TNLL.

BBTNLL memiliki kapasitas sedang dalam memelihara/mengatur akses pemanfaatan sumberdaya TNLL. Keterbatasan kapasitas pendanaan yang diungkapkan oleh Kepala BBTNLL untuk melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat menjadi hambatan bagi BBTNLL dalam menguatkan institusi lokal KKM yang telah dibentuk. Kapasitas pendanaan BBTNLL yang ada ditujukan untuk mendanai tugas pokok BBTNLL yakni untuk kegiatan pengamanan kawasan dan hanya sedikit dana untuk pemberdayaan masyarakat. Pihak yang banyak melakukan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah TNLL adalah BPDAS Palu-Poso melalui program rehabilitasi lahan dan perhutanan sosial. Namun, tidak semua wilayah TNLL menjadi prioritas pemberdayaan masyarakat bagi BPDAS Palu-Poso, karena didasarkan pada prioritas DAS.

Tabel 3. Penilaian hak, tanggung jawab dan manfaat para pihak terhadap ekosistem TNLL

<i>Stakeholder</i> yang menyatakan memiliki hak	<i>Stakeholder</i> yang menyatakan memiliki tanggung jawab	<i>Stakeholder</i> yang menyatakan menerima manfaat
1. BBTNLL, Lembaga Adat, Masyarakat Lokal, Kepala Desa, LKD, FWP.	1. BBTNLL, Kepala Desa, Lembaga Adat, LKD, FWP, BPDAS Palu-Poso, Bappeda Kab. Sigi, Dinas Pariwisata Kab. Sigi	1. Masyarakat Lokal
2. BPDAS Palu-Poso	2. LSM, Bappeda Kab. Poso, Dinas Pariwisata Kab. Poso,	2. BBTNLL
3. Bappeda Kab. Sigi, Perguruan tinggi dan peneliti, Dinas Pariwisata Kab. Sigi, Dinas Pariwisata Kab. Poso.	3. Masyarakat Lokal	3. LSM, BPDAS Palu-Poso, Perguruan tinggi dan peneliti
4. LSM	4. Perguruan tinggi dan peneliti,	4. LKD, FWP, Kepala Desa, Lembaga Adat, Bappeda Kab. Sigi, Dinas Pariwisata Kab Sigi, Bappeda Kab. Poso

Keterangan: 1. Sangat tinggi, 2. Tinggi, 3 Sedang, 4. Rendah

Program pemberdayaan yang dilakukan tersebut tidak bertujuan menguatkan institusi lokal KKM yang sudah terbentuk melainkan BPDAS membentuk institusi lokal tersendiri berdasarkan tujuan program rehabilitasi.

Proses penyusunan kesepakatan konservasi masyarakat di TNLL difasilitasi oleh LSM di antaranya adalah TNC, yayasan Karsa dan Jambata. Hasil wawancara yang dilakukan kepada Yayasan Karsa dan Jambata menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki kapasitas tinggi karena program mereka bergantung pada donor. Hal ini juga diungkapkan oleh Anshari (2006), LSM sebagai fasilitator di Taman Nasional Danau Sentarum memiliki kapasitas yang lemah dari sisi teknis maupun finansial dan sering kali perannya tidak konsisten karena harus menyesuaikan program yang ditawarkan oleh donor.

#### **Hak, Tanggung Jawab, Manfaat yang diperoleh para pihak dalam Pengelolaan TNLL**

Berdasarkan hasil wawancara terhadap *stakeholders* di TNLL diperoleh gambaran tentang hak, tanggung jawab dan manfaat yang diperoleh para *stakeholders* dalam pengelolaan TNLL. Hasil penilaian terhadap hak, tanggung jawab dan manfaat yang diterima oleh para *stakeholders* di TNLL terhadap sumberdaya di TNLL tercantum pada tabel 3.



Berdasarkan Tabel 3, pihak yang menyatakan memiliki hak yang sangat tinggi terhadap taman nasional adalah BBTNLL, Lembaga Adat, masyarakat lokal, Kepala Desa, LKD dan FWP. Hak BBTNLL adalah merencanakan dan melaksanakan pengelolaan TNLL. masyarakat lokal dan lembaga lokal seperti Lembaga Adat, LKD, Kepala Desa, dan FWP menganggap memiliki hak yang sangat tinggi terhadap TNLL telah dibangun KKM.

Para pihak yang menganggap memiliki tanggung jawab yang sangat tinggi terhadap TNLL adalah BBTNLL, Kepala Desa, Lembaga Adat, LKD, FWP, BPDAS, Bappeda Kab. Sigi, dan Dinas Pariwisata Kab. Sigi. Tanggung jawab para pihak itu, tercantum pada Tabel 17, antara lain mengamankan kawasan TNLL dan melestarikan biodiversitas oleh BBTNLL, menjaga kelestarian hutan dan air oleh Kepala Desa, menegakkan aturan adat dan kelestarian hutan oleh Lembaga Adat, melakukan monitoring hutan dan menegakkan aturan KKM oleh LKD, menyelesaikan konflik antar desa dan konflik desa dengan BBTNLL oleh FWP, mewujudkan kelestarian DAS yang ada di wilayah TNLL oleh BPDAS, mendukung kelestarian ekosistem TNLL dan peningkatan ekonomi masyarakat oleh Bappeda Kab. Sigi, dan melestarikan budaya, kearifan lokal masyarakat dan wisata alam di TNLL oleh Dinas Pariwisata Kab. Sigi

Hasil penelitian terungkap bahwa pihak yang memperoleh manfaat yang sangat tinggi terhadap ekosistem TNLL adalah masyarakat lokal. Manfaat yang terbesar yang dirasakan oleh masyarakat lokal itu adalah ketersediaan air dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. Pada sisi lain, pihak yang memiliki hak dan tanggung jawab yang tinggi terhadap ekosistem TNLL menganggap belum menerima manfaat yang sangat tinggi dari keberadaan TNLL. FWP menganggap memiliki tanggung jawab yang sangat tinggi yakni mengatasi konflik pemanfaatan sumberdaya hutan di TNLL namun ia tidak lagi memperoleh pendapatan. Hal ini menunjukkan adanya ketidak seimbangan antara

hak, tanggung jawab dan manfaat yang diterima oleh para pihak di TNLL. Ketidak seimbangan hak, tanggung jawab dan manfaat yang diterima oleh para pihak yang terlibat dalam KKM menjadi salah satu hambatan bagi keberlanjutan kesepakatan konservasi yang telah dibangun. Hal ini diungkapkan Dubois (1998), bahwa hambatan mewujudkan pengelolaan berkelanjutan adalah terjadi ketidak seimbangan antara hak, tanggung jawab dan manfaat yang diterima oleh para pihak. Manfaat merupakan komponen penting untuk memotivasi *stakeholder* dalam pengelolaan hutan kolaboratif.

#### **Hubungan Para Pihak dalam Pengelolaan TNLL**

Hubungan antar *stakeholders* dapat memiliki banyak dimensi (Petursson *et al.* 2011). Dalam kajian ini, hubungan para pihak itu dikelompokkan menjadi beberapa dimensi meliputi hubungan yang baik, kurang baik, buruk dan tidak memiliki hubungan. Hubungan tersebut ditampilkan pada Tabel 4.

Penetapan kesepakatan KKM di TNLL tidak membuat hubungan antara BBTNLL dengan masyarakat lokal dan institusi lokal lebih membaik. BBTNLL menjalankan tugasnya berdasarkan aturan formal pengelolaan taman nasional yang bersifat *command and control*, sementara masyarakat menganggap mereka memiliki hak yang kuat terhadap TNLL berdasarkan aturan KKM yang telah disepakati. Hubungan BBTNLL dengan masyarakat lokal dan organisasi di tingkat lokal bersifat kurang baik bahkan BBTNLL memiliki hubungan buruk dengan FWP. Meskipun telah dibangun kesepakatan konservasi, tetapi menurut masyarakat dan organisasi lokal (LKD, Kepala Desa, Lembaga Adat, FWP) bahwa BBTNLL seolah tidak peduli lagi dengan kesepakatan itu, terlebih dalam melakukan pembinaan. Hubungan yang kurang baik juga terjadi antara FWP dengan Bappeda Kab Sigi dan Bappeda Kab. Poso. Ketua dan pengurus FWP menganggap bahwa baik Pemda maupun BBTNLL tidak memiliki perhatian lagi terhadap organisasi ini padahal organisasi ini memiliki tanggung jawab yang sangat tinggi dalam mengatasi konflik

pemanfaatan sumberdaya lahan di TNLL. Hubungan yang kurang baik dan buruk antara pengelola taman nasional dengan masyarakat

lokal hampir terjadi di semua kawasan konservasi di Indonesia, lihat (Prabowo *et al.* 2010; Sembiring *et al.* 2010; Kadir *et al.* 2013).

Tabel 4. Hubungan para pihak dalam pengelolaan TNLL

Stakeholders	LKD	Kepada Desa	Lembaga Adat	FWP	BBTNLL	BPDAS	LSM	Perguruan Tinggi dan peneliti	Bappeda Kab. Sigi	Dinas Pariwisata Kab. Sigi	Bappeda Kab. Poso	Dinas Pariwisata Kab. Poso
Masyarakat Lokal	B	B	B	S	K	S	S	S	-	S	-	S
LKD		B	B	S	K	-	S	S	-	-	-	-
Kepada Desa			B	S	K	B	S	S	B	B	B	B
Lembaga Adat				B	K	-	S	S	B	S	B	S
FWP					Br	-	S	-	K	-	K	-
BBTNLL						B	S	B	B	S	S	S
BPDAS Palu-Poso							S	B	S	-	S	-
LSM								S	S	-	S	-
Perguruan Tinggi dan peneliti									S	S	S	S
Bappeda Kab. Sigi										B	S	-
Dinas Pariwisata Kab. Sigi											-	-
Bappeda Kab. Poso												B

Keterangan:

Kualitas hubungan: Baik (Baik) , Sedang (S), Kurang (K), Buruk (Br), tidak ada interaksi (-)

Baik (B) : Ada interaksi personal/institusi, sinergis, berkelanjutan, minimal 3 kali kontak/3 bln

Sedang (S) : Ada interaksi personal/institusi, sinergis, tidak berkelanjutan, maksimal 3 kali kontak/3 bln

Kurang (K) : Ada interaksi, kurang sinergis, terjadi polemik

Buruk (Br) : Ada interaksi, tidak sinergis, terjadi konflik

Tidak ada (-)

Pada sisi yang lain, hubungan BBTNLL terjalin baik dengan BPDAS, perguruan tinggi dan Bappeda Kabupaten Sigi. Terjalannya hubungan yang baik antara BBTNLL dengan BPDAS karena adanya tujuan yang sinergis antara tujuan BPDAS dengan BBTNLL yakni pelestarian ekosistem DAS yang ada di kawasan TNLL. Begitu juga dengan perguruan tinggi dan peneliti dengan BBTNLL dalam mendukung proses penelitian di TNLL. Hubungan yang baik antara BBTNLL dengan Bappeda Kabupaten Sigi bersumber dari

sinergitas tujuan pengembangan Kabupaten Sigi sebagai kabupaten konservasi.

Hubungan yang kurang baik dan bahkan hubungan buruk antara pengelola TNLL dengan institusi lokal dapat menjadi sumber konflik. Penataan hak, tanggung jawab dan manfaat yang diterima tidak cukup untuk meningkatkan kinerja institusi KKM manakala tidak terbangun komunikasi yang baik antara pengelola dengan institusi lokal yang diatur dalam KKM. Robbins (2002) mengungkapkan tidak ada kelompok atau

organisasi yang bertahan lama dan memiliki kinerja yang baik tanpa ada komunikasi yang baik. Proses kolaborasi dapat berjalan jika terdapat interaksi secara periodik di antara pihak yang berkolaborasi dan itu tidak mesti dalam bentuk pertemuan formal dan terjadwal (Wondolleck dan Yaffee 2000).

### KESIMPULAN

Kesepakatan konservasi masyarakat yang dinegosiasikan di TNLL belum dapat mewujudkan hubungan yang baik diantara para pihak yang berkepentingan terhadap sumberdaya TNLL, bahkan masih terjadi hubungan yang tidak baik antara pengelola TNLL dengan masyarakat lokal dan institusi lokal seperti LKD, kepala desa lembaga adat dan hubungan buruk antara pengelola TNLL dengan FWP. Bentuk hubungan yang kurang baik dan buruk itu terkait erat dengan perbedaan kepentingan terhadap TNLL dan ketidakseimbangan hak, tanggung jawab, dan manfaat yang diperoleh dalam pengelolaan TNLL dan mempengaruhi KKM. Institusi lokal seperti LKD, lembaga adat, FWP dan kepala desa sebagai institusi yang menyatakan memiliki hak dan tanggung jawab yang tinggi terhadap TNLL, yang diatur dalam KKM, ternyata tidak memperoleh menerima manfaat yang seimbang dengan hak dan tanggung jawabnya. Ketidakseimbangan antara hak, tanggung jawab

dan manfaat yang diperoleh menjadi salah satu kendala bagi keberlanjutan institusi KKM. Kendala lain bagi keberlanjutan KKM adalah faktor kapasitas masing-masing pihak dalam menjalankan kesepakatan itu. Di desa yang heterogen yang memiliki banyak suku pendatang, LKD dan lembaga adat memiliki kapasitas rendah dalam mengontrol akses penggunaan sumberdaya di TNLL, karena institusi lokal ini tidak dapat memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar. Selain itu, BBTNLL memiliki kapasitas rendah untuk memelihara kesepakatan yang telah dibangun, karena keterbatasan dana untuk melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap institusi lokal yang ada. Meskipun begitu, institusi lokal di desa homogen yang memiliki sedikit suku pendatang, memiliki kapasitas yang tinggi dalam mengontrol akses terhadap pemanfaatan sumberdaya di TNLL, sehingga keberadaannya penting untuk dipertimbangkan dalam pengelolaan TNLL. Penataan peran para pihak dalam mewujudkan keberlanjutan institusi KKM dalam pengelolaan TNLL sebaiknya mempertimbangkan kepentingan dan kapasitas para pihak itu melalui pengaturan hak, tanggung jawab dan manfaat yang akan diterima sehingga hubungan para pihak menjadi baik. Penataan peran para pihak itu harus dibarengi dengan proses komunikasi yang baik di antara para pihak yang berkepentingan terhadap sumberdaya TNLL.

### DAFTAR PUSTAKA

- Anshari GZ. 2006. Dapatkah pengelolaan kolaboratif menyelamatkan taman nasional Danau Sentarum?, Bogor, Center for International Forestry Research (CIFOR).
- Black JA, Champion DJ. 2009. *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*. Bandung: Reflika Aditama.
- Bryson JM. 2004. What to do when stakeholders matter: stakeholder identification and analysis techniques. *Public management review* 6(1):21-53.
- Dubois O. 1989. *Capacity to Manage Role Changes in Forestry : Introducing the '4Rs' Framework*: International Institute for Environmental and Development (IIED).
- Enserink B, Kwakkel J, Bots P, Hermans L, Thissen W, Koppenjan J. 2010. *Policy analysis of multi-actor systems*: Eleven International Publ.
- Irawan P. 2006. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu sosial*. Jakarta: DIA FISIP UI.

- Kadir AW, Nurhaedah M, Purwanti R. 2013. Konflik pada kawasan taman nasional Bantimurung Bulusaraung Provinsi Sulawesi Selatan dan upaya penyelesaiannya. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi kehutanan* 10(3):186-198.
- Kartodihardjo H. 2006. *Ekonomi dan Institusi Pengelolaan Hutan*. editor. Bogor, Institute for Development Economics of Agronomic and Rural Areas.
- Kasper W, Streit ME. 1999. *Institutional economics: social order and public policy*. Cheltenham: Edward Elgar.
- Ninan KN, Jyothis S, Babu P, Ramakrishnappa. 2007. *The Economic of Biodiversity Conservation*. London: Earthscan
- North DC. 1990. *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. New York: Cambridge university press.
- Nugroho B, Sukardi D, Widyantoro B. 2012. Studi dan Analisis Peraturan Perundangan Terkait dengan Pengelolaan pada Hutan, Hutan Berbasis Karbon, Penyerapan Karbon, Stok Karbon, dan Produk Ramah Lingkungan. *Laporan Teknis*, Jakarta, Kementerian Kehutanan RI dan ITTO.
- Ostrom E. 1990. *Governing the Common*. New York: Cambridge University Press.
- Ostrom E. 2005. Self-governance and forest resources. *Terracotta reader: a market approach to the environment. Academic Foundation, New Delhi*:131-155.
- Petursson JG, Vedeld P, Kaboggoza J. 2011. Transboundary biodiversity management: institutions, local stakeholders, and protected areas: a case study from Mt. Elgon, Uganda and Kenya. *Society & Natural Resources* 24(12):1304-1321.
- Prabowo SA, Basuni S, Suharjo D. 2010. Konflik Tanpa Henti: Permukiman dalam Kawasan Taman Nasional Halimun Salak (Enduring Conflict: Settlement in Halimun-Salak National Park Area). *Jurnal Manajemen Hutan Tropika* 16(3).
- Ribot JC, Peluso NL. 2003. A theory of access. *Rural sociology* 68(2):153-181.
- Robbins SP. 2002. *Prinsip-prinsip Perilaku Organisasi Edisi Kelima*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Schmid AA. 1987. *Property, power, and public choice: an inquiry into law and economics*. United states of America: Praeger.
- Sembiring E, Basuni S, Soekmadi R. 2010. Resolusi Konflik Pengelolaan Taman Nasional Teluk Cenderawasih di Kabupaten Teluk Wondama. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika* 16(2):84-91.
- Soekmadi R. 2003. Pergeseran Paradigma Pengelolaan Kawasan Konservasi: Sebuah Wacana Baru Dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi. *Media Konservasi* 3(3):87-93.
- Tilman D. 2000. Causes, consequences and ethics of biodiversity. *Nature* 405(6783):208-211.
- Wondollock JM, Yaffee SL. 2000. *Making collaboration work: Lessons from innovation in natural resource management*: Island Press.